



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
  - a. penjualan publikasi cetakan;
  - b. penjualan publikasi elektronik/softcopy;
  - c. penjualan data mentah;
  - d. penjualan peta digital wilayah;
  - e. penyeleksian calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ;
  - f. jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik bagi pegawai tugas belajar non-Badan Pusat Statistik;
  - g. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  - h. jasa sewa sarana dan prasarana Badan Pusat Statistik; dan
  - i. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

(2) Jenis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, yen, atau euro.

#### Pasal 3

- (1) Tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik/*softcopy*, data mentah, dan peta digital wilayah tidak termasuk biaya pengiriman dan jasa perbankan.
- (2) Biaya pengiriman dan jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas penyeleksian calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tidak termasuk biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
- (2) Biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik bagi pegawai tugas belajar non-Badan Pusat Statistik tidak termasuk biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
- (2) Biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib bayar.

#### Pasal 6

- (1) Tarif atas jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Terhadap pihak tertentu, untuk penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik/*softcopy*, data mentah, dan/atau peta digital wilayah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi pemerintah pusat dan daerah;
  - b. lembaga negara;
  - c. perwakilan negara asing; atau
  - d. lembaga internasional.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 127

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perencanaan dan Industri,



OPRIMO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2009  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, pengurangan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, dan dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5046



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2009  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. PENJUALAN PUBLIKASI CETAKAN</b>		
<b>A. Kelompok Multisubyek</b>		
1. Laporan Sosial Indonesia	Per eksemplar	Rp 63.000,00
2. Analisis Profil Perusahaan/Usaha Indonesia (Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi)	Per eksemplar	Rp 50.000,00
3. Analisis Sensus Ekonomi Mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia (Hasil Sensus Ekonomi Subsektor dan data Badan Pusat Statistik lainnya)	Per eksemplar	Rp 63.000,00
4. Buku Saku Statistik Indonesia	Per eksemplar	Rp 180.000,00
5. Indikator Ekonomi	Per eksemplar	Rp 50.000,00
6. Indikator Kesejahteraan Rakyat	Per eksemplar	Rp 85.000,00
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Per eksemplar	Rp 79.000,00
8. Laporan Perekonomian Indonesia	Per eksemplar	Rp 100.000,00
9. Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik	Per eksemplar	Rp 175.000,00
10. Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik Dasar	Per eksemplar	Rp 62.000,00
11. <i>Sampling Error</i> Survei Penduduk Antar Sensus	Per eksemplar	Rp 178.000,00
12. <i>Sampling Error</i> Survei Sosial Ekonomi Nasional	Per eksemplar	Rp 167.000,00

13. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13. Statistik Indonesia	Per eksemplar	Rp 300.000,00
14. Tinjauan Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulanan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
<b>B. Kelompok Sosial</b>		
1. Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Per eksemplar	Rp 71.000,00
2. Buklet Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Per eksemplar	Rp 61.000,00
3. Ringkasan Eksekutif Hasil Pendataan Potensi Desa	Per eksemplar	Rp 26.000,00
4. Indikator Pembangunan Berkelanjutan	Per eksemplar	Rp 56.000,00
5. Infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Berdasarkan Hasil Pendataan Potensi Desa	Per eksemplar	Rp 33.000,00
6. Laporan Statistik Kriminal	Per eksemplar	Rp 33.000,00
7. Laporan Studi Indikator Kekerasan	Per eksemplar	Rp 31.000,00
8. Perempuan dan Laki-laki Indonesia	Per eksemplar	Rp 28.000,00
9. Profil Kesehatan Ibu dan Anak	Per eksemplar	Rp 94.000,00
10. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia	Per eksemplar	Rp 165.000,00
11. Statistik Pemuda Indonesia	Per eksemplar	Rp 83.000,00
12. Statistik Pendidikan	Per eksemplar	Rp 83.000,00
13. Statistik Penduduk Lanjut Usia	Per eksemplar	Rp 54.000,00
14. Statistik Pertahanan dan Keamanan	Per eksemplar	Rp 48.000,00
15. Statistik Perumahan dan Pernuhunan	Per eksemplar	Rp 89.000,00
16. Statistik Politik dan Keamanan	Per eksemplar	Rp 59.000,00
17. Statistik Potensi Desa Indonesia	Per eksemplar	Rp 80.000,00
18. Statistik Potensi Desa Provinsi	Per eksemplar	Rp 80.000,00
19. Statistik Sosial Budaya	Per eksemplar	Rp 71.000,00

20. Statistik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20. Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir	Per eksemplar	Rp 59.000,00
21. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia	Per eksemplar	Rp 89.000,00
22. Keadaan Pekerja di Indonesia	Per eksemplar	Rp 89.000,00
23. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia	Per eksemplar	Rp 100.000,00
24. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi	Per eksemplar	Rp 177.000,00
25. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi	Per eksemplar	Rp 150.000,00
26. Statistik Kesejahteraan Rakyat	Per eksemplar	Rp 100.000,00
27. Statistik Upah	Per eksemplar	Rp 35.000,00
<b>C. Kelompok Produksi</b>		
1. Direktori Perusahaan Hortikultura	Per eksemplar	Rp 71.000,00
2. Direktori Statistik Konstruksi	Per eksemplar	Rp 236.000,00
3. Indikator Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Per eksemplar	Rp 35.000,00
4. Indikator Industri Mikro dan Kecil	Per eksemplar	Rp 43.000,00
5. Indikator Konstruksi Triwulanan	Per eksemplar	Rp 59.000,00
6. Indikator Pertanian	Per eksemplar	Rp 94.000,00
7. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Indonesia	Per eksemplar	Rp 94.000,00
8. Neraca Energi Indonesia	Per eksemplar	Rp 71.000,00
9. Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang	Per eksemplar	Rp 32.000,00
10. Produksi Perikanan Laut yang Dijual di Tempat Pelelangan Ikan	Per eksemplar	Rp 53.000,00
11. Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Indonesia	Per eksemplar	Rp 100.000,00

12. Profil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Per eksemplar	Rp 37.000,00
13. Profil Industri Mikro dan Kecil	Per eksemplar	Rp 60.000,00
14. Statistik Air Bersih	Per eksemplar	Rp 65.000,00
15. Statistik Gas Kota	Per eksemplar	Rp 65.000,00
16. Statistik Industri Karet Remah	Per eksemplar	Rp 71.000,00
17. Statistik Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Per eksemplar	Rp 67.000,00
18. Statistik Karet Indonesia	Per eksemplar	Rp 80.000,00
19. Statistik Kelapa Sawit Indonesia	Per eksemplar	Rp 44.000,00
20. Statistik Konstruksi	Per eksemplar	Rp 59.000,00
21. Statistik Listrik Perusahaan Listrik Negara	Per eksemplar	Rp 71.000,00
22. Statistik Pematangan Ternak	Per eksemplar	Rp 59.000,00
23. Statistik Pertambangan Bahan Galian	Per eksemplar	Rp 26.000,00
24. Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Per eksemplar	Rp 71.000,00
25. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi	Per eksemplar	Rp 59.000,00
26. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan	Per eksemplar	Rp 89.000,00
27. Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan	Per eksemplar	Rp 83.000,00
28. Statistik Perusahaan Perikanan	Per eksemplar	Rp 53.000,00
29. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah	Per eksemplar	Rp 47.000,00
30. Statistik Perusahaan Ternak Besar dan Kecil	Per eksemplar	Rp 47.000,00
31. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas	Per eksemplar	Rp 47.000,00

32. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
32. Statistik Tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias Indonesia	Per eksemplar	Rp 59.000,00
33. Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan	Per eksemplar	Rp 31.000,00
34. Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim	Per eksemplar	Rp 43.000,00
35. Statistik Teh Indonesia	Per eksemplar	Rp 47.000,00
36. Statistik Tempat Pelelangan Ikan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
37. Struktur Ongkos Usaha Tani Jagung	Per eksemplar	Rp 89.000,00
38. Struktur Ongkos Usaha Tani Kedelai	Per eksemplar	Rp 89.000,00
39. Struktur Ongkos Usaha Tani Padi	Per eksemplar	Rp 89.000,00
40. Statistik Industri Besar Sedang, Buku I	Per eksemplar	Rp 83.000,00
41. Statistik Industri Besar Sedang, Buku II	Per eksemplar	Rp 106.000,00
42. Statistik Industri Besar Sedang, Buku III	Per eksemplar	Rp 89.000,00
43. Direktori Industri Pengolahan	Per eksemplar	Rp 236.000,00
<b>D. Kelompok Distribusi dan Jasa</b>		
1. Diagram Timbang Buku 1	Per eksemplar	Rp 115.000,00
2. Diagram Timbang Buku 2	Per eksemplar	Rp 116.000,00
3. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Pendidikan, dan Transpor di 45 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 148.000,00
4. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Makanan di 45 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 148.000,00
5. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan di 45 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 148.000,00

6. Harga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang di 45 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 148.000,00
7. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Pendidikan, dan Transpor di 66 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 200.000,00
8. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Makanan di 66 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 200.000,00
9. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan di 66 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 200.000,00
10. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang di 66 Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 200.000,00
11. Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa	Per eksemplar	Rp 148.000,00
12. Indeks Harga Konsumen di 45 Kota di Indonesia (2002 = 100)	Per eksemplar	Rp 94.000,00
13. Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia (2007 = 100)	Per eksemplar	Rp 125.000,00
14. Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia	Per eksemplar	Rp 59.000,00
15. Profil Perusahaan/Usaha Jasa	Per eksemplar	Rp 150.000,00
16. Profil Perusahaan/Usaha Perdagangan	Per eksemplar	Rp 62.000,00
17. Statistik Biro Perjalanan Wisata	Per eksemplar	Rp 31.000,00
18. Statistik Harga Konsumen Pedesaan di Indonesia	Per eksemplar	Rp 106.000,00
19. Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Peternakan dan Perikanan	Per eksemplar	Rp 83.000,00
20. Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rakyat	Per eksemplar	Rp 83.000,00

21. Statistik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21. Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian di Indonesia	Per eksemplar	Rp 83.000,00
22. Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia	Per eksemplar	Rp 83.000,00
23. Statistik Kunjungan Tamu Asing	Per eksemplar	Rp 59.000,00
24. Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia	Per eksemplar	Rp 94.000,00
25. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura	Per eksemplar	Rp 65.000,00
26. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan	Per eksemplar	Rp 65.000,00
27. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan	Per eksemplar	Rp 65.000,00
28. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan	Per eksemplar	Rp 65.000,00
29. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat	Per eksemplar	Rp 65.000,00
30. Statistik Restoran/Rumah Makan	Per eksemplar	Rp 29.000,00
31. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan	Per eksemplar	Rp 59.000,00
32. Survei Biaya Hidup, Buku 1, Banda Aceh, dan Lhokseumawe	Per eksemplar	Rp 75.000,00
33. Survei Biaya Hidup, Buku 2, Medan, Sibolga, Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan	Per eksemplar	Rp 115.000,00
34. Survei Biaya Hidup, Buku 3, Padang	Per eksemplar	Rp 55.000,00
35. Survei Biaya Hidup, Buku 4, Pekanbaru dan Dumai	Per eksemplar	Rp 75.000,00
36. Survei Biaya Hidup, Buku 5, Jambi	Per eksemplar	Rp 55.000,00
37. Survei Biaya Hidup, Buku 6, Palembang	Per eksemplar	Rp 55.000,00

38. Survei . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
38. Survei Biaya Hidup, Buku 7, Bengkulu	Per eksemplar	Rp 55.000,00
39. Survei Biaya Hidup, Buku 8, Bandar Lampung	Per eksemplar	Rp 55.000,00
40. Survei Biaya Hidup, Buku 9, Pangkal Pinang	Per eksemplar	Rp 55.000,00
41. Survei Biaya Hidup, Buku 10, Tanjung Pinang, dan Batam	Per eksemplar	Rp 75.000,00
42. Survei Biaya Hidup, Buku 11, Jakarta	Per eksemplar	Rp 55.000,00
43. Survei Biaya Hidup, Buku 12, Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya	Per eksemplar	Rp 174.000,00
44. Survei Biaya Hidup, Buku 13, Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Tegal	Per eksemplar	Rp 115.000,00
45. Survei Biaya Hidup, Buku 14, Yogyakarta	Per eksemplar	Rp 55.000,00
46. Survei Biaya Hidup, Buku 15, Surabaya, Jember, Sumenep, Kediri, Probolinggo, dan Madiun	Per eksemplar	Rp 174.000,00
47. Survei Biaya Hidup, Buku 16, Serang, Tangerang, dan Cilegon	Per eksemplar	Rp 95.000,00
48. Survei Biaya Hidup, Buku 17, Denpasar	Per eksemplar	Rp 55.000,00
49. Survei Biaya Hidup, Buku 18, Mataram dan Bima	Per eksemplar	Rp 75.000,00
50. Survei Biaya Hidup, Buku 19, Kupang dan Maumere	Per eksemplar	Rp 75.000,00
51. Survei Biaya Hidup, Buku 20, Pontianak dan Singkawang	Per eksemplar	Rp 75.000,00
52. Survei Biaya Hidup, Buku 21, Palangkaraya dan Sampit	Per eksemplar	Rp 75.000,00
53. Survei Biaya Hidup, Buku 22, Banjarmasin	Per eksemplar	Rp 55.000,00

54. Survei . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
54. Survei Biaya Hidup, Buku 23, Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan	Per eksemplar	Rp 95.000,00
55. Survei Biaya Hidup, Buku 24, Manado	Per eksemplar	Rp 55.000,00
56. Survei Biaya Hidup, Buku 25, Palu	Per eksemplar	Rp 55.000,00
57. Survei Biaya Hidup, Buku 26, Makassar, Watampone, Pare-Pare, dan Palopo	Per eksemplar	Rp 115.000,00
58. Survei Biaya Hidup, Buku 27, Kendari	Per eksemplar	Rp 55.000,00
59. Survei Biaya Hidup, Buku 28, Gorontalo	Per eksemplar	Rp 55.000,00
60. Survei Biaya Hidup, Buku 29, Mamuju	Per eksemplar	Rp 55.000,00
61. Survei Biaya Hidup, Buku 30, Ambon	Per eksemplar	Rp 55.000,00
62. Survei Biaya Hidup, Buku 31, Ternate	Per eksemplar	Rp 55.000,00
63. Survei Biaya Hidup, Buku 32, Manokwari dan Sorong	Per eksemplar	Rp 75.000,00
64. Survei Biaya Hidup, Buku 33, Jayapura	Per eksemplar	Rp 55.000,00
65. Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel	Per eksemplar	Rp 59.000,00
66. Statistik Harga Perdagangan Besar Beberapa Provinsi di Indonesia	Per eksemplar	Rp 94.000,00
67. Statistik Perhubungan	Per eksemplar	Rp 177.000,00
68. Statistik Keuangan Pemerintah Pusat	Per eksemplar	Rp 71.000,00
69. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Per eksemplar	Rp 89.000,00
70. Statistik Lembaga keuangan	Per eksemplar	Rp 77.000,00
71. Buletin Statistik Ekspor	Per eksemplar	Rp 38.000,00
72. Buletin Statistik Impor	Per eksemplar	Rp 41.000,00
73. Statistik Ekspor, Jilid I	Per eksemplar	Rp 413.000,00

74. Statistik ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
74. Statistik Ekspor, Jilid II	Per eksemplar	Rp 177.000,00
75. Statistik Impor, Jilid I	Per eksemplar	Rp 354.000,00
76. Statistik Impor, Jilid II	Per eksemplar	Rp 236.000,00
77. Direktori Importir Indonesia, Volume I	Per eksemplar	Rp 236.000,00
78. Direktori Importir Indonesia, Volume II	Per eksemplar	Rp 345.000,00
79. Direktori Importir Indonesia, Volume III	Per eksemplar	Rp 249.000,00
<b>E. Kelompok Neraca dan Analisis</b>		
1. Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan	Per eksemplar	Rp 59.000,00
2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Penggunaan	Per eksemplar	Rp 89.000,00
3. Neraca Pemerintahan Pusat Indonesia Triwulanan	Per eksemplar	Rp 39.000,00
4. Neraca Pemerintahan Umum Indonesia	Per eksemplar	Rp 71.000,00
5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia	Per eksemplar	Rp 77.000,00
6. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha	Per eksemplar	Rp 89.000,00
7. Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Pengertian Dasar (Buku 1)	Per eksemplar	Rp 41.000,00
8. Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tatacara Penghitungan Menurut Lapangan Usaha (Buku 2)	Per eksemplar	Rp 51.000,00

9. Pedoman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota, Tata cara Penghitungan Menurut Penggunaan	Per eksemplar	Rp 56.000,00
10. Pendapatan Nasional Indonesia	Per eksemplar	Rp 94.000,00
11. Pendapatan Nasional Triwulanan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
12. Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan	Per eksemplar	Rp 89.000,00
13. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia	Per eksemplar	Rp 51.000,00
14. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial Indonesia	Per eksemplar	Rp 48.000,00
15. Tabel Input-Output Indonesia Jilid I	Per eksemplar	Rp 106.000,00
16. Tabel Input-Output Indonesia Jilid II	Per eksemplar	Rp 71.000,00
17. Tabel Input-Output Indonesia Jilid III	Per eksemplar	Rp 148.000,00
<b>F. Kelompok Sensus Penduduk</b>		
1. Estimasi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi	Per eksemplar	Rp 89.000,00
2. Penduduk Indonesia	Per eksemplar	Rp 236.000,00
3. Penduduk Provinsi	Per eksemplar	Rp 106.000,00
4. Proyeksi Penduduk Indonesia	Per eksemplar	Rp 50.000,00
5. Proyeksi Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Umur Tertentu	Per eksemplar	Rp 39.000,00
<b>G. Kelompok Sensus Pertanian</b>		
1. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Hortikultura	Per eksemplar	Rp 47.000,00
2. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Kehutanan	Per eksemplar	Rp 47.000,00
3. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Padi	Per eksemplar	Rp 53.000,00

4. Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Palawija	Per eksemplar	Rp 47.000,00
5. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perikanan	Per eksemplar	Rp 53.000,00
6. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perkebunan	Per eksemplar	Rp 47.000,00
7. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Peternakan	Per eksemplar	Rp 47.000,00
8. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Subsektor Padi, Palawija, dan Hortikultura	Per eksemplar	Rp 47.000,00
9. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Subsektor Perikanan dan Peternakan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
10. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Subsektor Perkebunan dan Kehutanan	Per eksemplar	Rp 47.000,00
11. Laporan Sementara Hasil Pendaftaran Rumah Tangga	Per eksemplar	Rp 71.000,00
12. Pendapatan Rumah Tangga Pertanian dan Indikator Sosial Ekonomi	Per eksemplar	Rp 47.000,00
13. Struktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Pertanian	Per eksemplar	Rp 47.000,00
14. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Kehutanan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
15. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Hortikultura	Per eksemplar	Rp 35.000,00
16. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perikanan	Per eksemplar	Rp 35.000,00

17. Uraian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perkebunan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
18. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Peternakan	Per eksemplar	Rp 35.000,00
19. Uraian Hasil Sensus Sampel Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	Per eksemplar	Rp 35.000,00
20. Uraian Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Padi	Per eksemplar	Rp 35.000,00
21. Uraian Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Palawija	Per eksemplar	Rp 35.000,00
<b>H. Kelompok Sensus Ekonomi</b>		
1. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku I	Per eksemplar	Rp 96.000,00
2. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku II	Per eksemplar	Rp 105.000,00
3. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku III	Per eksemplar	Rp 130.000,00
4. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku IV	Per eksemplar	Rp 156.000,00
5. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Menengah Besar Buku I	Per eksemplar	Rp 121.000,00
6. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Menengah Besar Buku II	Per eksemplar	Rp 135.000,00
7. Direktori Perusahaan Jasa Kesehatan Buku I	Per eksemplar	Rp 138.000,00
8. Direktori Perusahaan Jasa Kesehatan Buku II	Per eksemplar	Rp 119.000,00

9. Direktori ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Direktori Perusahaan Jasa Pariwisata	Per eksemplar	Rp 64.000,00
10. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Banten	Per eksemplar	Rp 26.000,00
11. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah DKI Jakarta	Per eksemplar	Rp 29.000,00
12. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Jawa Barat	Per eksemplar	Rp 59.000,00
13. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Jawa Tengah	Per eksemplar	Rp 56.000,00
14. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Jawa Timur	Per eksemplar	Rp 63.000,00
15. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Per eksemplar	Rp 35.000,00
16. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Kalimantan	Per eksemplar	Rp 39.000,00
17. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Maluku Papua	Per eksemplar	Rp 26.000,00
18. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Sulawesi	Per eksemplar	Rp 46.000,00
19. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Sumatera	Per eksemplar	Rp 94.000,00
20. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Yogyakarta	Per eksemplar	Rp 22.000,00
21. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Tinggi	Per eksemplar	Rp 41.000,00
22. Direktori Perusahaan Jasa-Jasa Buku I	Per eksemplar	Rp 112.000,00
23. Direktori Perusahaan Jasa-Jasa Buku II	Per eksemplar	Rp 97.000,00

24. Direktori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku I	Per eksemplar	Rp 147.000,00
25. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku II	Per eksemplar	Rp 132.000,00
26. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku III	Per eksemplar	Rp 142.000,00
27. Direktori Perusahaan Koperasi Buku I	Per eksemplar	Rp 145.000,00
28. Direktori Perusahaan Koperasi Buku II	Per eksemplar	Rp 130.000,00
29. Direktori Perusahaan Listrik, Gas, dan Air	Per eksemplar	Rp 58.000,00
30. Direktori Perusahaan Penyediaan Akomodasi	Per eksemplar	Rp 115.000,00
31. Direktori Perusahaan Penyediaan Makan Minum	Per eksemplar	Rp 63.000,00
32. Direktori Perusahaan Perantara Keuangan bukan Koperasi	Per eksemplar	Rp 197.000,00
33. Direktori Perusahaan Perdagangan Besar	Per eksemplar	Rp 122.000,00
34. Direktori Perusahaan Perdagangan Eceran Buku I	Per eksemplar	Rp 98.000,00
35. Direktori Perusahaan Perdagangan Eceran Buku II	Per eksemplar	Rp 104.000,00
36. Direktori Perusahaan Perdagangan Eceran Buku III	Per eksemplar	Rp 127.000,00
37. Direktori Perusahaan Pertambangan dan Penggalian	Per eksemplar	Rp 109.000,00
38. Direktori Perusahaan Real Estate	Per eksemplar	Rp 36.000,00
39. Direktori Perusahaan Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	Per eksemplar	Rp 112.000,00

40. Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
40. Hasil Pendaftaran Perusahaan/ Usaha, Sensus Ekonomi (Perantara Keuangan, Real Estate, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya, serta Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga) Indonesia	Per eksemplar	Rp 27.000,00
41. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perantara Keuangan, Real Estate, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya, serta Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga) Provinsi	Per eksemplar	Rp 27.000,00
42. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi) Indonesia	Per eksemplar	Rp 34.000,00
43. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi) Provinsi	Per eksemplar	Rp 34.000,00
44. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Pertambangan, Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi) Indonesia	Per eksemplar	Rp 42.000,00
45. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Pertambangan, Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi) Provinsi	Per eksemplar	Rp 42.000,00
46. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi, Indonesia	Per eksemplar	Rp 25.000,00

47. Hasil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
47. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi, Provinsi	Per eksemplar	Rp 25.000,00
48. Perusahaan di Indonesia, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 32.000,00
49. Perusahaan Menengah dan Besar Asuransi dan Dana Pensiun, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 33.000,00
50. Perusahaan Menengah dan Besar, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 33.000,00
51. Perusahaan Menengah dan Besar Industri Pengolahan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 144.000,00
52. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, Hiburan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 31.000,00
53. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 40.000,00
54. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Pendidikan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 39.000,00
55. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Perjalanan Wisata, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 30.000,00
56. Perusahaan Menengah dan Besar Konstruksi, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 34.000,00
57. Perusahaan Menengah dan Besar Koperasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 32.000,00
58. Perusahaan Menengah dan Besar Listrik, Gas, dan Air Bersih, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 45.000,00
59. Perusahaan Menengah dan Besar Pasar Modal, Pembiayaan, dan Modal Ventura, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 35.000,00

60. Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
60. Perusahaan Menengah dan Besar Pegadaian dan Pedagang Valas, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 34.000,00
61. Perusahaan Menengah dan Besar Penyediaan Hotel dan Akomodasi Lainnya, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 30.000,00
62. Perusahaan Menengah dan Besar Penyediaan Makan dan Minum, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 29.000,00
63. Perusahaan Menengah dan Besar Perbankan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 34.000,00
64. Perusahaan Menengah dan Besar Perdagangan Besar dan Eceran, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 50.000,00
65. Perusahaan Menengah dan Besar Pertambangan dan Penggalian, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 42.000,00
66. Perusahaan Menengah dan Besar Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 47.000,00
67. Perusahaan Menengah dan Besar Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 46.000,00
68. Perusahaan Mikro dan Kecil Transportasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 30.000,00
69. Perusahaan Mikro dan Kecil, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 34.000,00
70. Perusahaan Mikro dan Kecil Industri Pengolahan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 37.000,00
71. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Perorangan Lainnya, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 35.000,00

72. Perusahaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
72. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 37.000,00
73. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Pendidikan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 38.000,00
74. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 37.000,00
75. Perusahaan Mikro dan Kecil Komunikasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 37.000,00
76. Perusahaan Mikro dan Kecil Konstruksi, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 38.000,00
77. Perusahaan Mikro dan Kecil Listrik dan Air Bersih, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 37.000,00
78. Perusahaan Mikro dan Kecil Penyediaan Makan Minum, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 33.000,00
79. Perusahaan Mikro dan Kecil Perantara Keuangan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 35.000,00
80. Perusahaan Mikro dan Kecil Perdagangan Besar dan Eceran, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 40.000,00
81. Perusahaan Mikro dan Kecil Pertambangan dan Penggalian, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 50.000,00
82. Perusahaan Mikro dan Kecil Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 38.000,00
83. Ringkasan Eksekutif, Hasil Sensus Ekonomi	Per eksemplar	Rp 105.000,00

I. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. Kelompok Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi</b>		
1. Provinsi Dalam Angka	Per eksemplar	Rp 160.000,00
2. Berita Resmi Statistik	Per eksemplar	Rp 21.000,00
3. Buku Saku Provinsi Dalam Angka	Per eksemplar	Rp 84.000,00
4. Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya	Per eksemplar	Rp 33.000,00
5. Direktori Industri Pengolahan	Per eksemplar	Rp 48.000,00
6. Ekspor - Impor	Per eksemplar	Rp 50.000,00
7. Indeks Harga Konsumen	Per eksemplar	Rp 46.000,00
8. Indeks Pembangunan Manusia	Per eksemplar	Rp 46.000,00
9. Indikator Ekonomi	Per eksemplar	Rp 48.000,00
10. Indikator Kesejahteraan Rakyat	Per eksemplar	Rp 42.000,00
11. Indikator Sosial Ekonomi	Per eksemplar	Rp 50.000,00
12. Keadaan Angkatan Kerja	Per eksemplar	Rp 47.000,00
13. Luas Lahan Menurut Penggunaannya	Per eksemplar	Rp 42.000,00
14. Nilai Tukar Petani	Per eksemplar	Rp 28.000,00
15. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	Per eksemplar	Rp 41.000,00
16. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan	Per eksemplar	Rp 36.000,00
17. Produksi Tanaman Padi dan Palawija	Per eksemplar	Rp 40.000,00
18. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan	Per eksemplar	Rp 40.000,00
19. Satuan Harga Barang dan Jasa	Per eksemplar	Rp 41.000,00
20. Statistik Air Minum	Per eksemplar	Rp 30.000,00
21. Statistik Alat-Alat Pertanian	Per eksemplar	Rp 33.000,00
22. Statistik Energi, Pertambangan, dan Konstruksi	Per eksemplar	Rp 32.000,00

23. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23. Statistik Harga Konsumen	Per eksemplar	Rp 67.000,00
24. Statistik Harga Perdagangan Besar	Per eksemplar	Rp 40.000,00
25. Statistik Harga Produsen	Per eksemplar	Rp 41.000,00
26. Statistik Industri Besar dan Sedang	Per eksemplar	Rp 35.000,00
27. Statistik Kesejahteraan Rakyat	Per eksemplar	Rp 55.000,00
28. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Per eksemplar	Rp 44.000,00
29. Statistik Kriminal	Per eksemplar	Rp 40.000,00
30. Statistik Pendidikan	Per eksemplar	Rp 41.000,00
31. Statistik Perhubungan	Per eksemplar	Rp 50.000,00
32. Survei Sosial Ekonomi Nasional	Per eksemplar	Rp 80.000,00
33. Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel	Per eksemplar	Rp 44.000,00
34. Tinjauan Ekonomi Regional	Per eksemplar	Rp 33.000,00
<b>J. Kelompok Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota</b>		
1. Kabupaten/Kota Dalam Angka	Per eksemplar	Rp 110.000,00
2. Buku Saku Kabupaten/Kota Dalam Angka	Per eksemplar	Rp 68.000,00
3. Kecamatan Dalam Angka	Per eksemplar	Rp 46.000,00
4. Indeks Gini Rasio	Per eksemplar	Rp 31.000,00
5. Indeks Harga Konsumen	Per eksemplar	Rp 35.000,00
6. Indeks Harga Perdagangan Besar	Per eksemplar	Rp 34.000,00
7. Indeks Kemahalan Konstruksi	Per eksemplar	Rp 32.000,00
8. Indeks Pembangunan Manusia	Per eksemplar	Rp 41.000,00
9. Indikator Ekonomi	Per eksemplar	Rp 40.000,00
10. Indikator Kesejahteraan Rakyat	Per eksemplar	Rp 34.000,00
11. Indikator Pertanian	Per eksemplar	Rp 34.000,00

12. Indikator ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Indikator Sosial	Per eksemplar	Rp 44.000,00
13. Inflasi	Per eksemplar	Rp 34.000,00
14. Luas Lahan Sawah Menurut Penggunaannya	Per eksemplar	Rp 33.000,00
15. Produk Domestik Regional Bruto	Per eksemplar	Rp 41.000,00
16. Profil Penduduk	Per eksemplar	Rp 39.000,00
17. Registrasi Penduduk	Per eksemplar	Rp 27.000,00
18. Statistik Angkatan Kerja	Per eksemplar	Rp 34.000,00
19. Statistik Kesejahteraan Rakyat	Per eksemplar	Rp 42.000,00
20. Statistik Penduduk	Per eksemplar	Rp 36.000,00
21. Statistik Perhotelan	Per eksemplar	Rp 27.000,00
22. Statistik Perhubungan	Per eksemplar	Rp 32.000,00
23. Statistik Pertanian Tanaman Pangan	Per eksemplar	Rp 33.000,00
<b>II. PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK/SOFTCOPY (Dalam Bentuk Image)</b>		
<b>A. Kelompok Multisubyek</b>		
1. Laporan Sosial Indonesia	Per keping	Rp 63.000,00
2. Analisis Profil Perusahaan/Usaha Indonesia (Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi)	Per keping	Rp 50.000,00
3. Analisis Sensus Ekonomi Mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia (Hasil Sensus Ekonomi Subsektor dan data Badan Pusat Statistik lainnya)	Per keping	Rp 63.000,00
4. Buku Saku Statistik Indonesia	Per keping	Rp 180.000,00
5. Indikator Ekonomi	Per keping	Rp 50.000,00

6. Indikator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Indikator Kesejahteraan Rakyat	Per keping	Rp 85.000,00
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Per keping	Rp 79.000,00
8. Laporan Perekonomian Indonesia	Per keping	Rp 100.000,00
9. Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik	Per keping	Rp 175.000,00
10. Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik Dasar	Per keping	Rp 62.000,00
11. <i>Sampling Error</i> Survei Penduduk Antar Sensus	Per keping	Rp 178.000,00
12. <i>Sampling Error</i> Survei Sosial Ekonomi Nasional	Per keping	Rp 167.000,00
13. Statistik Indonesia	Per keping	Rp 300.000,00
14. Tinjauan Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulanan	Per keping	Rp 35.000,00
<b>B. Kelompok Sosial</b>		
1. Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Per keping	Rp 71.000,00
2. Buklet Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Per keping	Rp 61.000,00
3. Ringkasan Eksekutif Hasil Pendataan Potensi Desa	Per keping	Rp 26.000,00
4. Indikator Pembangunan Berkelanjutan	Per keping	Rp 56.000,00
5. Infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan Berdasarkan Hasil Pendataan Potensi Desa	Per keping	Rp 33.000,00
6. Laporan Statistik Kriminal	Per keping	Rp 33.000,00
7. Laporan Studi Indikator Kekerasan	Per keping	Rp 31.000,00
8. Perempuan dan Laki-laki Indonesia	Per keping	Rp 28.000,00
9. Profil Kesehatan Ibu dan Anak	Per keping	Rp 94.000,00
10. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia	Per keping	Rp 165.000,00

11. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Statistik Pemuda Indonesia	Per keping	Rp 83.000,00
12. Statistik Pendidikan	Per keping	Rp 83.000,00
13. Statistik Penduduk Lanjut Usia	Per keping	Rp 54.000,00
14. Statistik Pertahanan dan Keamanan	Per keping	Rp 48.000,00
15. Statistik Perumahan dan Permukiman	Per keping	Rp 89.000,00
16. Statistik Politik dan Keamanan	Per keping	Rp 59.000,00
17. Statistik Potensi Desa Indonesia	Per keping	Rp 80.000,00
18. Statistik Potensi Desa Provinsi	Per keping	Rp 80.000,00
19. Statistik Sosial Budaya	Per keping	Rp 71.000,00
20. Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir	Per keping	Rp 59.000,00
21. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia	Per keping	Rp 89.000,00
22. Keadaan Pekerja di Indonesia	Per keping	Rp 89.000,00
23. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia	Per keping	Rp 100.000,00
24. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi	Per keping	Rp 177.000,00
25. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi	Per keping	Rp 150.000,00
26. Statistik Kesejahteraan Rakyat	Per keping	Rp 100.000,00
27. Statistik Upah	Per keping	Rp 35.000,00
<b>C. Kelompok Produksi</b>		
1. Direktori Perusahaan Hortikultura	Per keping	Rp 71.000,00
2. Direktori Statistik Konstruksi	Per keping	Rp 236.000,00
3. Indikator Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Per keping	Rp 35.000,00
4. Indikator Industri Mikro dan Kecil	Per keping	Rp 43.000,00
5. Indikator Konstruksi Triwulanan	Per keping	Rp 59.000,00

6. Indikator ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Indikator Pertanian	Per keping	Rp 94.000,00
7. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Indonesia	Per keping	Rp 94.000,00
8. Neraca Energi Indonesia	Per keping	Rp 71.000,00
9. Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang	Per keping	Rp 32.000,00
10. Produksi Perikanan Laut yang Dijual di Tempat Pelelangan Ikan	Per keping	Rp 53.000,00
11. Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Indonesia	Per keping	Rp 100.000,00
12. Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Per keping	Rp 37.000,00
13. Profil Industri Mikro dan Kecil	Per keping	Rp 60.000,00
14. Statistik Air Bersih	Per keping	Rp 65.000,00
15. Statistik Gas Kota	Per keping	Rp 65.000,00
16. Statistik Industri Karet Remah	Per keping	Rp 71.000,00
17. Statistik Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Per keping	Rp 67.000,00
18. Statistik Karet Indonesia	Per keping	Rp 80.000,00
19. Statistik Kelapa Sawit Indonesia	Per keping	Rp 44.000,00
20. Statistik Konstruksi	Per keping	Rp 59.000,00
21. Statistik Listrik Perusahaan Listrik Negara	Per keping	Rp 71.000,00
22. Statistik Pematangan Ternak	Per keping	Rp 59.000,00
23. Statistik Pertambangan Bahan Galian	Per keping	Rp 26.000,00
24. Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Per keping	Rp 71.000,00
25. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi	Per keping	Rp 59.000,00

26. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26. Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan	Per keping	Rp 89.000,00
27. Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan	Per keping	Rp 83.000,00
28. Statistik Perusahaan Perikanan	Per keping	Rp 53.000,00
29. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah	Per keping	Rp 47.000,00
30. Statistik Perusahaan Ternak Besar dan Kecil	Per keping	Rp 47.000,00
31. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas	Per keping	Rp 47.000,00
32. Statistik Tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias Indonesia	Per keping	Rp 59.000,00
33. Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan	Per keping	Rp 31.000,00
34. Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim	Per keping	Rp 43.000,00
35. Statistik Teh Indonesia	Per keping	Rp 47.000,00
36. Statistik Tempat Pelelangan Ikan	Per keping	Rp 35.000,00
37. Struktur Ongkos Usaha Tani Jagung	Per keping	Rp 89.000,00
38. Struktur Ongkos Usaha Tani Kedelai	Per keping	Rp 89.000,00
39. Struktur Ongkos Usaha Tani Padi	Per keping	Rp 89.000,00
40. Statistik Industri Besar Sedang, Buku I	Per keping	Rp 83.000,00
41. Statistik Industri Besar Sedang, Buku II	Per keping	Rp 106.000,00
42. Statistik Industri Besar Sedang, Buku III	Per keping	Rp 89.000,00
43. Direktori Industri Pengolahan	Per keping	Rp 236.000,00

D. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>D. Kelompok Distribusi dan Jasa</b>		
1. Diagram Timbang Buku 1	Per keping	Rp 115.000,00
2. Diagram Timbang Buku 2	Per keping	Rp 116.000,00
3. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Pendidikan, dan Transpor di 45 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 148.000,00
4. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Makanan di 45 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 148.000,00
5. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan di 45 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 148.000,00
6. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang di 45 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 148.000,00
7. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Pendidikan, dan Transpor di 66 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 200.000,00
8. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Makanan di 66 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 200.000,00
9. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan di 66 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 200.000,00
10. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang di 66 Kota di Indonesia	Per keping	Rp 200.000,00
11. Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa	Per keping	Rp 148.000,00
12. Indeks Harga Konsumen di 45 Kota di Indonesia (2002 = 100)	Per keping	Rp 94.000,00
13. Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia (2007 = 100)	Per keping	Rp 125.000,00
14. Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia	Per keping	Rp 59.000,00

15. Profil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15. Profil Perusahaan/Usaha Jasa	Per keping	Rp 150.000,00
16. Profil Perusahaan/Usaha Perdagangan	Per keping	Rp 62.000,00
17. Statistik Biro Perjalanan Wisata	Per keping	Rp 31.000,00
18. Statistik Harga Konsumen Pedesaan di Indonesia	Per keping	Rp 106.000,00
19. Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Peternakan dan Perikanan	Per keping	Rp 83.000,00
20. Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rakyat	Per keping	Rp 83.000,00
21. Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian di Indonesia	Per keping	Rp 83.000,00
22. Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia	Per keping	Rp 83.000,00
23. Statistik Kunjungan Tamu Asing	Per keping	Rp 59.000,00
24. Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia	Per keping	Rp 94.000,00
25. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura	Per keping	Rp 65.000,00
26. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan	Per keping	Rp 65.000,00
27. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan	Per keping	Rp 65.000,00
28. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan	Per keping	Rp 65.000,00
29. Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat	Per keping	Rp 65.000,00
30. Statistik Restoran/Rumah Makan	Per keping	Rp 29.000,00
31. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan	Per keping	Rp 59.000,00
32. Survei Biaya Hidup, Buku 1, Banda Aceh dan Lhokseumawe	Per keping	Rp 75.000,00

33. Survei . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
33. Survei Biaya Hidup, Buku 2, Medan, Sibolga, Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan	Per keping	Rp 115.000,00
34. Survei Biaya Hidup, Buku 3, Padang	Per keping	Rp 55.000,00
35. Survei Biaya Hidup, Buku 4, Pekanbaru dan Dumai	Per keping	Rp 75.000,00
36. Survei Biaya Hidup, Buku 5, Jambi	Per keping	Rp 55.000,00
37. Survei Biaya Hidup, Buku 6, Palembang	Per keping	Rp 55.000,00
38. Survei Biaya Hidup, Buku 7, Bengkulu	Per keping	Rp 55.000,00
39. Survei Biaya Hidup, Buku 8, Bandar Lampung	Per keping	Rp 55.000,00
40. Survei Biaya Hidup, Buku 9, Pangkal Pinang	Per keping	Rp 55.000,00
41. Survei Biaya Hidup, Buku 10, Tanjung Pinang dan Batam	Per keping	Rp 75.000,00
42. Survei Biaya Hidup, Buku 11, Jakarta	Per keping	Rp 55.000,00
43. Survei Biaya Hidup, Buku 12, Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya	Per keping	Rp 174.000,00
44. Survei Biaya Hidup, Buku 13, Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Tegal	Per keping	Rp 115.000,00
45. Survei Biaya Hidup, Buku 14, Yogyakarta	Per keping	Rp 55.000,00
46. Survei Biaya Hidup, Buku 15, Surabaya, Jember, Sumenep, Kediri, Probolinggo, dan Madiun	Per keping	Rp 174.000,00
47. Survei Biaya Hidup, Buku 16, Serang, Tangerang, Cilegon	Per keping	Rp 95.000,00
48. Survei Biaya Hidup, Buku 17, Denpasar	Per keping	Rp 55.000,00

49. Survei . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
49. Survei Biaya Hidup, Buku 18, Mataram dan Bima	Per keping	Rp 75.000,00
50. Survei Biaya Hidup, Buku 19, Kupang dan Maumere	Per keping	Rp 75.000,00
51. Survei Biaya Hidup, Buku 20, Pontianak dan Singkawang	Per keping	Rp 75.000,00
52. Survei Biaya Hidup, Buku 21, Palangkaraya dan Sampit	Per keping	Rp 75.000,00
53. Survei Biaya Hidup, Buku 22, Banjarmasin	Per keping	Rp 55.000,00
54. Survei Biaya Hidup, Buku 23, Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan	Per keping	Rp 95.000,00
55. Survei Biaya Hidup, Buku 24, Manado	Per keping	Rp 55.000,00
56. Survei Biaya Hidup, Buku 25, Palu	Per eksemplar	Rp 55.000,00
57. Survei Biaya Hidup, Buku 26, Makassar, Watampone, Pare-Pare, dan Palopo	Per keping	Rp 115.000,00
58. Survei Biaya Hidup, Buku 27, Kendari	Per keping	Rp 55.000,00
59. Survei Biaya Hidup, Buku 28, Gorontalo	Per keping	Rp 55.000,00
60. Survei Biaya Hidup, Buku 29, Mamuju	Per keping	Rp 55.000,00
61. Survei Biaya Hidup, Buku 30, Ambon	Per keping	Rp 55.000,00
62. Survei Biaya Hidup, Buku 31, Ternate	Per keping	Rp 55.000,00
63. Survei Biaya Hidup, Buku 32, Manokwari dan Sorong	Per keping	Rp 75.000,00
64. Survei Biaya Hidup, Buku 33, Jayapura	Per keping	Rp 55.000,00
65. Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel	Per keping	Rp 59.000,00
66. Statistik Harga Perdagangan Besar Beberapa Provinsi di Indonesia	Per keping	Rp 94.000,00
67. Statistik Perhubungan	Per keping	Rp 177.000,00

68. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
68. Statistik Keuangan Pemerintah Pusat	Per keping	Rp 71.000,00
69. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Per keping	Rp 89.000,00
70. Statistik Lembaga keuangan	Per keping	Rp 77.000,00
71. Buletin Statistik Ekspor	Per keping	Rp 38.000,00
72. Buletin Statistik Impor	Per keping	Rp 41.000,00
73. Statistik Ekspor, Jilid I	Per keping	Rp 413.000,00
74. Statistik Ekspor, Jilid II	Per keping	Rp 177.000,00
75. Statistik Impor, Jilid I	Per keping	Rp 354.000,00
76. Statistik Impor, Jilid II	Per keping	Rp 236.000,00
77. Direktori Importir Indonesia, Volume I	Per keping	Rp 236.000,00
78. Direktori Importir Indonesia, Volume II	Per keping	Rp 345.000,00
79. Direktori Importir Indonesia, Volume III	Per keping	Rp 249.000,00
<b>E. Kelompok Neraca dan Analisis</b>		
1. Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan	Per keping	Rp 59.000,00
2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Penggunaan	Per keping	Rp 89.000,00
3. Neraca Pemerintahan Pusat Indonesia Triwulanan	Per keping	Rp 39.000,00
4. Neraca Pemerintahan Umum Indonesia	Per keping	Rp 71.000,00
5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia	Per keping	Rp 77.000,00
6. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha	Per keping	Rp 89.000,00

7. Pedoman ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Pengertian Dasar (Buku 1)	Per keping	Rp 41.000,00
8. Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tatacara Penghitungan Menurut Lapangan Usaha (Buku 2)	Per keping	Rp 51.000,00
9. Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota, Tata cara Penghitungan Menurut Penggunaan	Per keping	Rp 56.000,00
10. Pendapatan Nasional Indonesia	Per keping	Rp 94.000,00
11. Pendapatan Nasional Triwulanan	Per keping	Rp 35.000,00
12. Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan	Per keping	Rp 89.000,00
13. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia	Per keping	Rp 51.000,00
14. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial Indonesia	Per keping	Rp 48.000,00
15. Tabel Input-Output Indonesia Jilid I	Per keping	Rp 106.000,00
16. Tabel Input-Output Indonesia Jilid II	Per keping	Rp 71.000,00
17. Tabel Input-Output Indonesia Jilid III	Per keping	Rp 148.000,00
<b>F. Kelompok Sensus Penduduk</b>		
1. Estimasi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi	Per keping	Rp 89.000,00
2. Penduduk Indonesia	Per keping	Rp 236.000,00
3. Penduduk Provinsi	Per keping	Rp 106.000,00
4. Proyeksi Penduduk Indonesia	Per keping	Rp 50.000,00
5. Proyeksi Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Umur Tertentu	Per keping	Rp 39.000,00

G. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>G. Kelompok Sensus Pertanian</b>		
1. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Hortikultura	Per keping	Rp 47.000,00
2. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Kehutanan	Per keping	Rp 47.000,00
3. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Padi	Per keping	Rp 53.000,00
4. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Palawija	Per keping	Rp 47.000,00
5. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perikanan	Per keping	Rp 53.000,00
6. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perkebunan	Per keping	Rp 47.000,00
7. Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Peternakan	Per keping	Rp 47.000,00
8. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Subsektor Padi, Palawija, dan Hortikultura	Per keping	Rp 47.000,00
9. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Subsektor Perikanan dan Peternakan	Per keping	Rp 35.000,00
10. Laporan Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Subsektor Perkebunan dan Kehutanan	Per keping	Rp 47.000,00
11. Laporan Sementara Hasil Pendaftaran Rumah Tangga	Per keping	Rp 71.000,00
12. Pendapatan Rumah Tangga Pertanian dan Indikator Sosial Ekonomi	Per keping	Rp 47.000,00
13. Struktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Pertanian	Per keping	Rp 47.000,00
14. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Kehutanan	Per keping	Rp 35.000,00

15. Uraian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Hortikultura	Per keping	Rp 35.000,00
16. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perikanan	Per keping	Rp 35.000,00
17. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perkebunan	Per keping	Rp 35.000,00
18. Uraian Hasil Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Peternakan	Per keping	Rp 35.000,00
19. Uraian Hasil Sensus Sampel Pendapatan Rumah Tangga Pertanian	Per keping	Rp 35.000,00
20. Uraian Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Padi	Per keping	Rp 35.000,00
21. Uraian Pencacahan Rumah Tangga Pertanian Subsektor Palawija	Per keping	Rp 35.000,00
<b>H. Kelompok Sensus Ekonomi</b>		
1. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku I	Per keping	Rp 96.000,00
2. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku II	Per keping	Rp 105.000,00
3. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku III	Per keping	Rp 130.000,00
4. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Kecil Buku IV	Per keping	Rp 156.000,00
5. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Menengah Besar Buku I	Per keping	Rp 121.000,00
6. Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Skala Menengah Besar Buku II	Per keping	Rp 135.000,00

7. Direktori ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Direktori Perusahaan Jasa Kesehatan Buku I	Per keping	Rp 138.000,00
8. Direktori Perusahaan Jasa Kesehatan Buku II	Per keping	Rp 119.000,00
9. Direktori Perusahaan Jasa Pariwisata	Per keping	Rp 64.000,00
10. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Banten	Per keping	Rp 26.000,00
11. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah DKI Jakarta	Per keping	Rp 29.000,00
12. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Jawa Barat	Per keping	Rp 59.000,00
13. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Jawa Tengah	Per keping	Rp 56.000,00
14. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Jawa Timur	Per keping	Rp 63.000,00
15. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Bali, dan Nusa Tenggara	Per keping	Rp 35.000,00
16. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Kalimantan	Per keping	Rp 39.000,00
17. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Maluku Papua	Per keping	Rp 26.000,00
18. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Sulawesi	Per keping	Rp 46.000,00
19. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Pulau Sumatera	Per keping	Rp 94.000,00
20. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Menengah Yogyakarta	Per keping	Rp 22.000,00
21. Direktori Perusahaan Jasa Pendidikan Tinggi	Per keping	Rp 41.000,00

22. Direktori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
22. Direktori Perusahaan Jasa-Jasa Buku I	Per keping	Rp 112.000,00
23. Direktori Perusahaan Jasa-Jasa Buku II	Per keping	Rp 97.000,00
24. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku I	Per keping	Rp 147.000,00
25. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku II	Per keping	Rp 132.000,00
26. Direktori Perusahaan Konstruksi Buku III	Per keping	Rp 142.000,00
27. Direktori Perusahaan Koperasi Buku I	Per keping	Rp 145.000,00
28. Direktori Perusahaan Koperasi Buku II	Per keping	Rp 130.000,00
29. Direktori Perusahaan Listrik, Gas, dan Air	Per keping	Rp 58.000,00
30. Direktori Perusahaan Penyediaan Akomodasi	Per keping	Rp 115.000,00
31. Direktori Perusahaan Penyediaan Makan Minum	Per keping	Rp 63.000,00
32. Direktori Perusahaan Perantara Keuangan bukan Koperasi	Per keping	Rp 197.000,00
33. Direktori Perusahaan Perdagangan Besar	Per keping	Rp 122.000,00
34. Direktori Perusahaan Perdagangan Eceran Buku I	Per keping	Rp 98.000,00
35. Direktori Perusahaan Perdagangan Eceran Buku II	Per keping	Rp 104.000,00
36. Direktori Perusahaan Perdagangan Eceran Buku III	Per keping	Rp 127.000,00
37. Direktori Perusahaan Pertambangan dan Penggalian	Per keping	Rp 109.000,00
38. Direktori Perusahaan Real Estate	Per keping	Rp 36.000,00

39. Direktori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
39. Direktori Perusahaan Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	Per keping	Rp 112.000,00
40. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perantara Keuangan, Real Estate, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya, serta Jasa Perorangan yang melayani Rumah Tangga) Indonesia	Per keping	Rp 27.000,00
41. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perantara Keuangan, Real Estate, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya, serta Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga) Provinsi	Per keping	Rp 27.000,00
42. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi) Indonesia	Per keping	Rp 34.000,00
43. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi) Provinsi	Per keping	Rp 34.000,00
44. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Pertambangan, Penggalan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi) Indonesia	Per keping	Rp 42.000,00
45. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi (Pertambangan, Penggalan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi) Provinsi	Per keping	Rp 42.000,00

46. Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
46. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi, Indonesia	Per keping	Rp 25.000,00
47. Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha, Sensus Ekonomi, Provinsi	Per keping	Rp 25.000,00
48. Perusahaan di Indonesia, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 32.000,00
49. Perusahaan Menengah dan Besar Asuransi dan Dana Pensiun, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 33.000,00
50. Perusahaan Menengah dan Besar, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 33.000,00
51. Perusahaan Menengah dan Besar Industri Pengolahan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 144.000,00
52. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, Hiburan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 31.000,00
53. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 40.000,00
54. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Pendidikan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 39.000,00
55. Perusahaan Menengah dan Besar Jasa Perjalanan Wisata, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 30.000,00
56. Perusahaan Menengah dan Besar Konstruksi, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 34.000,00
57. Perusahaan Menengah dan Besar Koperasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 32.000,00
58. Perusahaan Menengah dan Besar Listrik, Gas, dan Air Bersih, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 45.000,00
59. Perusahaan Menengah dan Besar Pasar Modal, Pembiayaan, dan Modal Ventura, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 35.000,00

60. Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
60. Perusahaan Menengah dan Besar Pegadaian dan Pedagang Valas, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 34.000,00
61. Perusahaan Menengah dan Besar Penyediaan Hotel dan Akomodasi Lainnya, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 30.000,00
62. Perusahaan Menengah dan Besar Penyediaan Makan dan Minum, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 29.000,00
63. Perusahaan Menengah dan Besar Perbankan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 34.000,00
64. Perusahaan Menengah dan Besar Perdagangan Besar dan Eceran, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 50.000,00
65. Perusahaan Menengah dan Besar Pertambangan dan Penggalan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 42.000,00
66. Perusahaan Menengah dan Besar Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 47.000,00
67. Perusahaan Menengah dan Besar Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 46.000,00
68. Perusahaan Mikro dan Kecil Transportasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 30.000,00
69. Perusahaan Mikro dan Kecil, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 34.000,00
70. Perusahaan Mikro dan Kecil Industri Pengolahan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 37.000,00
71. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Perorangan Lainnya, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 35.000,00
72. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 37.000,00

73. Perusahaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
73. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Pendidikan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 38.000,00
74. Perusahaan Mikro dan Kecil Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 37.000,00
75. Perusahaan Mikro dan Kecil Komunikasi, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 37.000,00
76. Perusahaan Mikro dan Kecil Konstruksi, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 38.000,00
77. Perusahaan Mikro dan Kecil Listrik dan Air Bersih, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 37.000,00
78. Perusahaan Mikro dan Kecil Penyediaan Makan Minum, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 33.000,00
79. Perusahaan Mikro dan Kecil Perantara Keuangan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 35.000,00
80. Perusahaan Mikro dan Kecil Perdagangan Besar dan Eceran, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 40.000,00
81. Perusahaan Mikro dan Kecil Pertambangan dan Penggalian, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 50.000,00
82. Perusahaan Mikro dan Kecil Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 38.000,00
83. Ringkasan Eksekutif, Hasil Sensus Ekonomi	Per keping	Rp 105.000,00
<b>I. Kelompok Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi</b>		
1. Provinsi Dalam Angka	Per keping	Rp 160.000,00
2. Berita Resmi Statistik	Per keping	Rp 21.000,00
3. Buku Saku Provinsi Dalam Angka	Per keping	Rp 84.000,00

4. Direktori ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya	Per keping	Rp 33.000,00
5. Direktori Industri Pengolahan	Per keping	Rp 48.000,00
6. Ekspor - Impor	Per keping	Rp 50.000,00
7. Indeks Harga Konsumen	Per keping	Rp 46.000,00
8. Indeks Pembangunan Manusia	Per keping	Rp 46.000,00
9. Indikator Ekonomi	Per keping	Rp 48.000,00
10. Indikator Kesejahteraan Rakyat	Per keping	Rp 42.000,00
11. Indikator Sosial Ekonomi	Per keping	Rp 50.000,00
12. Keadaan Angkatan Kerja	Per keping	Rp 47.000,00
13. Luas Lahan Menurut Penggunaannya	Per keping	Rp 42.000,00
14. Nilai Tukar Petani	Per keping	Rp 28.000,00
15. PDRB Menurut Lapangan Usaha	Per keping	Rp 41.000,00
16. PDRB Menurut Penggunaan	Per keping	Rp 36.000,00
17. Produksi Tanaman Padi dan Palawija	Per keping	Rp 40.000,00
18. Produksi Tanaman Sayuran & Buah-buahan	Per keping	Rp 40.000,00
19. Satuan Harga Barang dan Jasa	Per keping	Rp 41.000,00
20. Statistik Air Minum	Per keping	Rp 30.000,00
21. Statistik Alat-Alat Pertanian	Per keping	Rp 33.000,00
22. Statistik Energi, Pertambangan dan Konstruksi	Per keping	Rp 32.000,00
23. Statistik Harga Konsumen	Per keping	Rp 67.000,00
24. Statistik Harga Perdagangan Besar	Per keping	Rp 40.000,00
25. Statistik Harga Produsen	Per keping	Rp 41.000,00
26. Statistik Industri Besar dan Sedang	Per keping	Rp 35.000,00
27. Statistik Kesejahteraan Rakyat	Per keping	Rp 55.000,00

28. Statistik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
28. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Per keping	Rp 44.000,00
29. Statistik Kriminal	Per keping	Rp 40.000,00
30. Statistik Pendidikan	Per keping	Rp 41.000,00
31. Statistik Perhubungan	Per keping	Rp 50.000,00
32. Survei Sosial Ekonomi Nasional	Per keping	Rp 80.000,00
33. Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel	Per keping	Rp 44.000,00
34. Tinjauan Ekonomi Regional	Per keping	Rp 33.000,00
<b>J. Kelompok Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota</b>		
1. Kabupaten/Kota Dalam Angka	Per keping	Rp 110.000,00
2. Buku Saku Kabupaten/Kota Dalam Angka	Per keping	Rp 68.000,00
3. Kecamatan Dalam Angka	Per keping	Rp 46.000,00
4. Indeks Gini Rasio	Per keping	Rp 31.000,00
5. Indeks Harga Konsumen	Per keping	Rp 35.000,00
6. Indeks Harga Perdagangan	Per keping	Rp 34.000,00
7. Indeks Kemahalan Konstruksi	Per keping	Rp 32.000,00
8. Indeks Pembangunan Manusia	Per keping	Rp 41.000,00
9. Indikator Ekonomi	Per keping	Rp 40.000,00
10. Indikator Kesejahteraan Rakyat	Per keping	Rp 34.000,00
11. Indikator Pertanian	Per keping	Rp 34.000,00
12. Indikator Sosial	Per keping	Rp 44.000,00
13. Inflasi	Per keping	Rp 34.000,00
14. Luas Lahan Sawah Menurut Penggunaannya	Per keping	Rp 33.000,00

15. Produk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15. Produk Domestik Regional Bruto	Per keping	Rp 41.000,00
16. Profil Penduduk	Per keping	Rp 39.000,00
17. Registrasi Penduduk	Per keping	Rp 27.000,00
18. Statistik Angkatan Kerja	Per keping	Rp 34.000,00
19. Statistik Kesejahteraan Rakyat	Per keping	Rp 42.000,00
20. Statistik Penduduk	Per keping	Rp 36.000,00
21. Statistik Perhotelan	Per keping	Rp 27.000,00
22. Statistik Perhubungan	Per keping	Rp 32.000,00
23. Statistik Pertanian Tanaman Pangan	Per keping	Rp 33.000,00
<b>III. PENJUALAN DATA MENTAH</b>		
1. Sampai dengan 50 MB	Per 1000 bytes	Rp 100,00
2. Di atas 50 MB sampai dengan 100 MB	Per 1000 bytes	Rp 50,00
3. Di atas 100 MB sampai dengan 500 MB	Per 1000 bytes	Rp 25,00
4. Di atas 500 MB	Per 1000 bytes	Rp 15,00
<b>IV. PENJUALAN DATA PETA DIGITAL WILAYAH</b>		
1. Peta Indonesia per Provinsi	Per peta	Rp 210.000,00
2. Peta Indonesia per Kabupaten/Kota	Per peta	Rp 320.000,00
3. Peta Provinsi per Kabupaten/Kota	Per peta	Rp 45.000,00
4. Peta Kabupaten/Kota per Kecamatan	Per peta	Rp 45.000,00
5. Peta Kabupaten/Kota per Desa/Kelurahan/nama lain	Per peta	Rp 80.000,00
6. Peta Kecamatan per Desa/Kelurahan/nama lain	Per peta	Rp 25.000,00

V. PENYELEKSIAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>V. PENYELEKSIAN CALON MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK</b>		
Biaya penyeleksian calon mahasiswa baru	Per pendaftaran	Rp 225.000,00
<b>VI. JASA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR NON-BADAN PUSAT STATISTIK</b>		
1. Biaya pendidikan semester gasal, tingkat I	Per mahasiswa	Rp 3.075.000,00
2. Biaya pendidikan semester genap, tingkat I	Per mahasiswa	Rp 2.775.000,00
3. Biaya pendidikan semester gasal, tingkat II	Per mahasiswa	Rp 2.775.000,00
4. Biaya pendidikan semester genap, tingkat II	Per mahasiswa	Rp 2.775.000,00
5. Biaya pendidikan semester gasal, tingkat III	Per mahasiswa	Rp 7.775.000,00
6. Biaya pendidikan semester genap, tingkat III	Per mahasiswa	Rp 2.775.000,00
7. Biaya pendidikan semester gasal, tingkat IV	Per mahasiswa	Rp 3.275.000,00
8. Biaya pendidikan semester genap, tingkat IV	Per mahasiswa	Rp 4.775.000,00
<b>VII. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL</b>		
<b>A. Diklat Teknis</b>		
1. Statistik 1, Paket 7 hari (minimal 15 orang)	Per orang	Rp 5.500.000,00
2. Statistik 2, Paket 14 hari (minimal 15 orang)	Per orang	Rp 8.500.000,00
3. Komputer 1, Paket 7 hari (minimal 15 orang)	Per orang	Rp 5.500.000,00
4. Komputer 2, Paket 14 hari (minimal 15 orang)	Per orang	Rp 8.500.000,00

B. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>B. Diklat Fungsional</b>		
1. Statistik Dasar Jarak Jauh, 5 bulan (minimal 15 orang)	Per orang	Rp 3.500.000,00
2. Statistik Tingkat Terampil, 24 hari (minimal 20 orang)	Per orang	Rp 13.500.000,00
3. Statistik Tingkat Ahli, 24 hari (minimal 20 orang)	Per orang	Rp 13.500.000,00
4. Pranata Komputer Tingkat Terampil, 24 bulan (minimal 20 orang)	Per orang	Rp 13.500.000,00
5. Pranata Komputer Tingkat Ahli, 24 bulan (minimal 20 orang)	Per orang	Rp 13.500.000,00
<b>VIII. JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA BADAN PUSAT STATISTIK</b>		
<b>Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan</b>		
1. Ruang Auditorium	Per 8 jam	Rp 2.500.000,00
2. Ruang kelas reguler	Per 8 jam	Rp 500.000,00
3. Ruang kelas komputer (termasuk 20 komputer)	Per 8 jam	Rp 1.500.000,00
4. Kamar Asrama	Per kamar/ hari	Rp 300.000,00
5. Kamar VIP	Per kamar/ hari	Rp 500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perencanaan, Kependidikan dan Industri,



Setyo Sapto Nugroho